

### **BAB III**

## **KEKUATAN JUNTA MILITER DALAM PEMERINTAHAN MYANMAR**

Pada bab III ini akan membahas tentang awal mula sejarah pemerintahan junta militer sudah mengambil alih sistem pemerintahan sejak 1960. Bagaimana hubungan pemerintahan militer dengan warga sipil, dan kekuatan militer di era kontemporer sekarang. Dan bagaimana kebijakan setiap pemimpin Myanmar dalam masa kepemimpinannya.

#### **A. SEJARAH REZIM JUNTA MILITER**

Myanmar sempat menerapkan sistem pemerintahan demokrasi sejak kemerdekaan di tahun 1948. Diawali dengan Jepang berhasil mendapatkan dua wilayah di Myanmar. Jepang melakukan pelatihan militer kepada masyarakat pada masa kependudukannya yang mana Jepang diterima oleh pejabat dan masyarakat Myanmar. Masyarakat tidak menyalakan pengalaman yang mereka dapatkan dari pelatihan militer yang mereka dapatkan dari Jepang untuk perkembangan militer di Myanmar.

Pada masa awal perang dunia ke II, Jepang mendapatkan julukan sebagai negara pelopor dalam pembebasan di kawasan Asia Tenggara. Aung San bersama rekan-rekannya pergi ke Jepang tahun 1939 untuk berjumpa dengan kolonel Suzuki. Aung San bersama kolonel Suzuki berniat untuk mengambil alih kekuasaan Inggris di Myanmar.

Pada tahun 1941 Aung San kembali ke Myanmar dan merekrut anggota militer Myanmar yang diberi nama *thakins* dan mendapatkan pelatihan militer dari pemerintah Jepang. Jepang pun mendukung pembentukan *Burma Independence Army* (BIA) di Myanmar, yang cukup mendukung kekuatan Jepang di Myanmar.

BIA diterima dengan baik oleh masyarakat Myanmar, dalam waktu yang sangat singkat BIA memperluas wilayahnya ke daerah pedesaan di Myanmar. BIA menjadi kekuatan yang sangat solid dan populer di Myanmar. Walaupun BIA tidak

terlalu memainkan peran penting dalam militer Myanmar, tetapi BIA membantu kekuatan Jepang di Myanmar.<sup>1</sup> Bagaimanapun juga kekuatan militer Jepang yang ada di Myanmar memperkuat penduduk Jepang di Myanmar, yang mana pada akhirnya militer Jepang menyerang balik BIA karena Jepang merasa tidak nyaman dengan semakin naiknya popularitas BIA.

Militer Jepang memerintahkan BIA untuk dibubarkan pada tahun 1942, pembubaran BIA oleh militer Jepang tidak menjadi penurunan popularitas, bahkan popularitas BIA masih besar dalam menarik perhatian masyarakat. Tindakan mengekang yang dilakukan oleh militer Jepang memunculkan adanya gerakan anti Jepang diseluruh Myanmar.

Perdana menteri U Nu memegang pemerintahan Myanmar cukup lama, sejak Myanmar merdeka tahun 1948 sampai 1962. Pada tahun 1958 kelompok militer yang dipimpin Jendral Ne Win melakukan kudeta kepada pemerintahan U Nu, kudeta yang dilakukan oleh Jendral Ne Win bukan tanpa alasan krisis politik yang terus meningkat selama pemerintahan U Nu yang mana akibat dari perpecahan dalam partai *Anti-Facist People's Freedom League* (AFPL). Jendral Ne Win mengadakan pemilu di Myanmar pada tahun 1960, yang dimana tujuan diadakannya pemilu tersebut untuk menegakkan demokrasi dan mengembalikan pemerintah ke pihak sipil.

Partai persatuan yang dipimpin oleh U Nu memenangkan pemilu tahun 1960 dan menjadikan U Nu terpilih sebagai perdana menteri untuk yang kedua kalinya. Tapi pemerintahan U Nu di turunkan secara paksa oleh Jendral Ne Win pada tanggal 2 maret 1962. Perebutan kekuasaan antara sipil dan militer, menyebabkan campur tangan militer dalam dominasi politik di Myanmar.

---

<sup>1</sup> Dorothy Guyot, *The Burma Independence Army: A Political Movement in Military Garb* dalam Verinder Grover Ed. *Politic and Government of Asian Countries, Series 10 : Myanmar*. New Delhi: Deep and Deep Publications Pvt. Ltd., 2000, hal 169

Penyebab campur tangan Jendral Ne Win terhadap pemerintahan U Nu bukan hanya disebabkan oleh krisis politik semata tetapi juga karena adanya beberapa faktor:<sup>2</sup>

*Pertama*, politisi sipil yang dianggap tidak mampu menciptakan politik yang sehat dan stabil di Myanmar. *Kedua*, keamanan yang terus menerus mengancam tidak bisa diatasi dengan baik oleh pemerintahan U Nu. Seperti pemberontakan sekelompok etnis karen dan Shan. *Ketiga*, pribadi U Nu sebagai pemimpin yang dinilai kurang tegas dalam mengambil keputusan dan kurang cepat dalam mengambil tindakan dalam keadaan mendesak menjadi salah satu faktor intervensi yang dilakukan oleh Jendral Ne Win ke pemerintahan U Nu.

Sejak kudeta yang dilakukan junta militer dibawah kepemimpinan Jendral Ne Win, Myanmar menjalankan pemerintahan militer yang didukung oleh Dewan Revolusi. Tujuan dari pemerintahan militer yaitu:<sup>3</sup>

- Reformasi ekonomi
- Membatasi pengaruh luar negeri dari berbagai aspek kehidupan di Myanmar dari segi ekonomi, politik dan sosial.
- Merubah nilai dan perilaku masyarakat, sehingga membuat pemerintahan yang baru bisa menciptakan revolusi.
- Menyatukan rakyat Myanmar yang memiliki banyak etnis menjadi bangsa yang satu.

Dalam menjalankan tujuannya, pemerintah junta militer gagal dalam menjalankan pemerintahan yang seperti mereka inginkan, pemerintah junta militer juga gagal membuat kebijakan yang memberikan dampak baik bagi masyarakat. Terbuktinya dengan produksi padi yang semakin menurun hanya sebanyak 5,3% pada tahun 1965- 1966 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemberontakan dari kelompok etnis masih terjadi. Selain itu juga, jumlah kejahatan dan kriminalitas di Myanmar yang semakin meningkat dari sebelumnya. Sehingga berita atau isu yang menyebutkan

---

<sup>2</sup> Alfian, *Militer dan Politik: Pengalaman Beberapa Negara*, Jakarta: LIPI, 1970, hal. 6 - 7

<sup>3</sup> Edward Feit, *The Armed Bureaucrats*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1973, hal. 99

bahwa pemerintahan sipil telah gagal dalam menjalankan pemerintahannya mulai berkurang. Masyarakat Myanmar mulai meragukan pemerintah junta militer bisa mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya, bahkan ada sebagian masyarakat yang berani menanggung keputusan bahwa pemerintahan militer yang menyebabkan kehidupan di Myanmar semakin memburuk.

Junta militer yang semakin mendominasi melakukan kebijakan pada tahun 1963 dan 1964, *Revolutionary Council* melakukan nasionalisasi kepada semua industri, bisnis, bahkan bioskop juga dinasionalisasikan oleh pemerintah. Selain itu juga kebijakan lain dari pemerintah junta militer menutup perpustakaan yang ada di Myanmar dan debat publik tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Pemerintah juga melakukan strategi untuk mengawasi seluruh penerbitan buku di Myanmar, mencakup dari sampul majalah dan kalender. Seluruh surat kabar ikut dinasionalisasikan dan diganti dengan surat kabar yang sudah dikontrol atau diatur dalam cetakannya pada tahun 1969.<sup>4</sup>

*National Solidarity Act* pada tahun 1964 menghapus semua partai politik yang ada di Myanmar, dan pemerintah junta militer hanya mengakui satu partai yakni *Burma Socialist Program Party* (BSSP).

*State Development and Peace Council* (SDPC) yang dibentuk tahun 1977 menunjukkan peran militer didalam politik di Myanmar, SDPC sebelumnya bernama *State Law and Order Restoration Council* (SLORC). Awal mula didirikannya SLORC adalah untuk memperbaiki kondisi politik di Myanmar.<sup>5</sup> SLORC yang merupakan lembaga kaki tangan dari pemerintah junta militer belum juga menunjukkan peluang Myanmar untuk menuju pemerintahan yang demokratis. Pemerintah junta militer masih sibuk dengan usaha- usaha

---

<sup>4</sup> Dewi, Mutiara Ita. *Pengalaman Militer Burma : Sebuah Analisis Historis-Politis*. Hal. 6

<sup>5</sup> *Ibid. Hal 6*

untuk bisa mempertahankan hegemoni junta militer dalam waktu yang lama. Keterlibatan pemerintah junta militer didalam kehidupan politik di Myanmar sesuai dengan tujuan intervensi yang disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Militer menganggap bahwa mereka mengemban tugas untuk menyelamatkan negara. Myanmar memang perlu untuk diselamatkan dari berbagai macam hal tetapi militer melakukan pendekatan dengan cara kekerasan apakah itu merupakan cara yang paling ampuh untuk menghentikan ancaman yang terjadi.
2. Kepentingan perorangan atau kelompok. Myanmar menganut ideologi kepentingan nasional yakni ada 3 *non-disintegration of the Union, non-disintegration of National Solidarity, perpetuation of national sovereignty*. Kepentingan nasional itu entah apakah benar- benar untuk kepentingan nasional atau jalan untuk melancarkan kepentingan kelompok militer.
3. Tentara merasa lebih penting (self important mottive)
4. Perasaan harga diri militer yang kuat berkaitan dengan masalah *defense*.
5. Perasaan militer lebih superior dibandingkan sipil. Orang sipil dianggap tidak efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan, padahal itu semua tidak bisa dibuktikan karena pemerintahan sipil belum terlalu lama menduduki pemerintahan.

## B. HUBUNGAN ANTARA SIPIL DAN MILITER DI MYANMAR

Menurut Huntington hubungan antara sipil dan militer dapat dikategorikan dalam 5 pola:<sup>6</sup>

1. Ideologi anti militer, kekuatan militer yang besar, profesionalisme militer yang rendah. Hal ini sering dijumpai dalam negara primitif, seperti Jerman saat perang dunia I maupun AS saat perang dunia II
2. Ideologi anti militer, kekuatan militer yang rendah, profesionalisme militer rendah. Hal ini sering dijumpai dalam negara totaliter, misalnya Jerman di perang dunia II.
3. Ideologi anti militer, kekuatan militer rendah, profesionalisme militer yang besar. Hal ini dapat dilihat contoh kasus AS di awal kemunculan profesionalisme militer pasca perang sipil sampai PD II.
4. Ideologi pro militer, kekuatan militer besar, profesionalisme militer yang tinggi. Contoh : Prussia dan Jerman dalam epos Bismarckian- Molkean (1860-1890).
5. Ideologi anti militer, kekuatan militer yang rendah, profesionalisme militer yang tinggi. Contoh : Inggris abad ke-20.

Dari lima kategori di atas menurut Huntington yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisi hubungan antara sipil dan militer di Myanmar adalah yang pertama karena sampai sekarang kekuatan militer memang sangat kuat dalam mendominasi di semua sektor kehidupan masyarakat. Akan tetapi bisa dikatakan profesionalisme militer di Myanmar rendah karena terhasut dalam kehidupan politik. Sementara kalau kita lihat dari ideologi Myanmar dilihat dari sudut

---

<sup>6</sup> Huntington, Samuel P. *The Soldier and State*, Cambridge:Harverd University Press, 1957, hal 96 Dalam hal ini, ideologi tidak diartikan secara mendalam sebagai pemikiran yang mendasar dan menyeluruh tentang hakekat kehidupan yang menghasilkan adanya sistem kehidupan. Ideologi menurut Hutington di sini berarti sebatas ajaran, perspektif atau pandangan saja.

pandang masyarakat anti dengan militer, tetapi militer tentu tidak anti dengan militer.

Dilihat dari perspektif yang lain, Myanmar bisa dikatakan sebagai negara yang menganut pretorianisme jika dilihat dari hubungan antara sipil dan militer. Pretorianisme dilihat dari militer yang menjadi aktor utama dan dominan dalam menggunakan kekerasan atau ancaman dari kekuasaan yang mereka miliki.

Frederick Mundell Watkins dalam *Encyclopedia of The Social Sciences* edisi tahun 1933, pretorianisme mengacu pada situasi dimana militer dalam suatu masyarakat tertentu melaksanakan kekuasaan politik yang otoriter dalam masyarakat berkat penggunaan kekuasaan yang absolut yang dimiliki atau dengan cara mengancam.<sup>7</sup> Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pretorianisme merupakan intervensi militer dalam politik maupun dunia sipil lainnya.

Pretorianisme menurut Amos Perlmutter dibagi menjadi beberapa tipe yaitu historis dan modern. Pretorianisme modern dibagi menjadi tiga yakni otokrasi, oligarki, dan otoriter. Pretorianisme otokrasi bentuk kekuasaan militer yang sederhana dimana pemerintah hanya dikuasai oleh satu orang. Pretorianisme oligarki dimana pemerintah dikuasai oleh kelompok elit. Pretorianisme otoriter ditandai dengan adanya pemerintahan sipil dan militer. Rezim militer hampir semuanya terdiri dari tentara, birokrat, manajer, dan tektorat yang membatasi dukungan dan mobilisasi politik. Mayoritas badan eksekutif dalam rezim otoriter kemungkinan terdiri dari orang-orang militer atau pejabat sipil dan kepala pemerintahan belum tentu dari anggota militer.

Dari penjelasan pretorianisme yang disebutkan tadi, Myanmar bisa dikategorikan dalam pretorianisme oligarki, karena sampai sekarang pemerintahan dikuasai oleh kelompok dari elit militer meskipun sebagian di parlemen ada politisi sipil.

---

<sup>7</sup> Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1985 hal. 142

Hal yang menarik untuk dicermati dalam hubungan antara sipil dan militer adalah sistem yang mengatur kepartaian dalam hubungannya. Partai menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah junta militer untuk mempertahankan hegemoninya. Myanmar sendiri memiliki beberapa partai, yakni *National League for Democracy* (NLD), *National Unity Party* (NUP), *Shan Nationalities League for Democracy* (SNLD), dan juga beberapa partai kecil.

Jika sebelumnya pada pemerintahan Jendral Ne Win hanya ada satu partai yakni Burma Socialist Programme Party (BSSP), yang selalu mendominasi pemerintahan pada saat itu. Sekarang pemerintah junta militer mengeluarkan kebijakan yang mana bebas untuk membentuk partai politik. NUP yang merupakan partai pro terhadap rezim pemerintahan militer menjadi saran bagi pemerintah junta militer dalam mempertahankan kedudukan militer di Myanmar.

SDPC selain menggunakan partai dalam memperkuat hegemoninya, juga menggunakan organisasi sosial politik untuk mendapat dukungan massa yang banyak yaitu *Union Solidarity and Development Association* (USDA) dengan Than Aung menjabat sebagai sekretaris umum. USDA memiliki tujuan untuk mengerahkan massa yang sekarang sudah memiliki anggota sekitar 11 juta, yakni 35% jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Ketua USDA adalah Jendral than Shwe yang memiliki peran sangat besar di Myanmar karena menduduki beberapa jabatan penting. USDA memiliki senjata yang sangat ampuh dalam melawan partai pro demokrasi NLD, karena USDA dalam merekrut anggota mengambil dari semua pegawai di pemerintahan. Dominasi junta militer di Myanmar relatif konstan dan tetap, yang cukup jarang ditemui di negara dunia ketiga. Padahal dalam negara dunia ketiga dominasi militer cenderung pasang surut dan tetap ada tetap pergesekan antara sipil dan pemerintah walau tidak bersifat radikal.

Politisi dari kalangan sipil sangat sulit untuk menggeser pemerintahan junta militer. Bahkan Aung San Suu Kyi yang terus menerus menyuarakan demokrasi justru sering menjadi



tahanan rumah di negaranya sendiri, saat berusaha untuk menggoyahkan dominasi dari junta militer. Pemerintahan sipil tidak bisa berkutik di Myanmar, dilihat dari pemerintahan sebelumnya yakni perdana menteri U Nu yang dikudeta oleh Jendral Ne Win. Jadi, hubungan antara sipil dan militer selalu dimenangkan oleh pihak militer. Cukup unik kasus yang terjadi di Myanmar dimana masyarakat sipil sama sekali tidak mempunyai pengaruh dalam menyampaikan hak dan keinginannya. Disebabkan oleh pemerintah junta militer yang mengatur semua sektor kehidupan di Myanmar demi melanggengkan hegemoninya. Masyarakat hanya bisa diam tidak bisa berbuat apa-apa dan harus ikut dalam semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah junta militer.

SDPC juga membatasi ruang gerak masyarakat di sektor pendidikan, budaya, dan komunikasi. Seperti dalam contoh kasus di bidang teknologi, tahun 2001 pemerintah hanya menyediakan 11 saluran telepon untuk 2000 penduduk, sedangkan biaya telepon nirkabel pada saat itu sangat mahal, sehingga masyarakat jarang memiliki.

Membayangkan menjadi masyarakat Myanmar betapa kurang sejahteranya hidup disana. Masyarakat selalu memprotes kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah junta militer, tanggapan junta militer kepada para demonstran selalu dengan cara kekerasan. Seperti pada tahun 1989, aktivis mahasiswa dan *Democratic Party for a New Society* (DNPS) yang melakukan aksi kampanye, ditangkap dan dipenjarakan oleh junta militer.

## C. KEKUATAN MILITER MYANMAR MASA SEKARANG

Sampai sekarang, kekuatan dari junta militer masih sangat kuat, walau masyarakat tidak menyukai junta militer. Dalam pemikiran junta militer yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya pemerintahan rezim militer ini bisa eksis untuk waktu yang lama. Serta tidak memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin mengubah sistem pemerintahan. Masyarakat yang tidak ingin hidupnya terus menerus menderita akhirnya terpaksa memasuki dunia militer agar bisa mendapatkan posisi yang nyaman di pemerintahan. Hal tersebut menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah anggota militer setiap tahunnya. Menurut data, jumlah personel militer pada tahun 1988 sekitar 450.000 jiwa, lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah personel di tahun 1988. Jumlah Tatamadaw menduduki urutan ke 2 terbesar di kawasan Asia tenggara setelah Vietnam. Tahun 2001 jumlah personel militer meningkat lagi menjadi 550.000 jiwa yang terdiri 460.667 personel laki- laki dan 89.333 personel perempuan.<sup>8</sup> Peningkatan jumlah personel yang terjadi tiap tahunnya kemungkinan disebabkan oleh anggaran pemerintah di bidang militer yang cukup tinggi yakni US 39\$ atau sekitar 2,1% dari GNP Myanmar. Pemerintah junta militer juga menghabiskan lebih dari 1 milyar USD untuk membeli 150 pesawat tempur, 30 kapal baru untuk angkatan laut, 170 tank, 2.500 personel lapis baja, sistem untuk peluncuran roket, senjata infanteri dan perangkat militer lainnya.<sup>9</sup> Anggaran dana dibidang militer yang besar mungkin menjadi penyebab kenaikan jumlah personel militer tiap tahunnya. Karena

---

<sup>8</sup> diakses dari CIA -- *The World Factbook*,  
<http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bm.html>.

<sup>9</sup> Dr. Marco Bunte, "institutionalising Military Rule in Myanmar : External and Internal factors",  
[https://www.researchgate.net/publication/266566147\\_Institutionalising\\_Military\\_Rule\\_in\\_BurmaMyanmar\\_External\\_and\\_Internal\\_Factors](https://www.researchgate.net/publication/266566147_Institutionalising_Military_Rule_in_BurmaMyanmar_External_and_Internal_Factors), diakses pada 11 oktober 2018.

kehidupan di dunia militer lebih sejahtera dan bisa menjamin hidup mereka dibandingkan menjadi masyarakat sipil biasa.

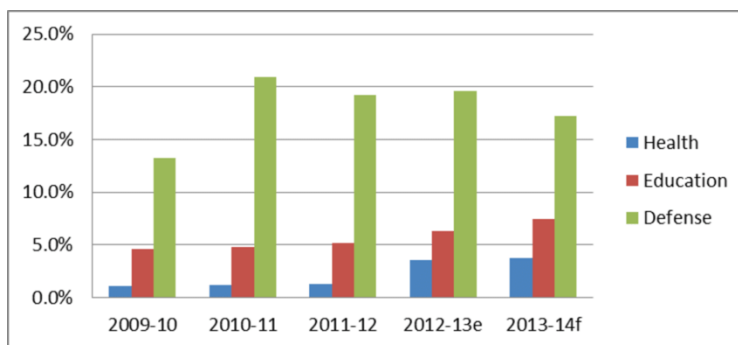
### 3.1 Anggaran Belanja Militer Myanmar tahun 1988- 2003

Year	MMK (in billions)	% of GDP
1988	1.6	2.1
1989	3.7	3
1990	5.2	3.4
1991	5.9	3.2
1992	8.4	3.4
1993	12.7	3.5
1994	16.7	3.5
1995	22.3	3.7
1996	27.7	3.5
1997	29.8	2.7
1998	37.3	2.3
1999	43.7	2.0
2000	58.9	2.3
2001	63.9	1.8
2002	73.1	1.3
2003	-	2.3

Source: SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm; Note: from 2002–2010 no data available; data for 2002–2003 provided by Taylor 2010.

[https://www.researchgate.net/publication/266566147\\_Institutionalising\\_Military\\_Rule\\_in\\_BurmaMyanmar\\_External\\_and\\_Internal\\_Factors](https://www.researchgate.net/publication/266566147_Institutionalising_Military_Rule_in_BurmaMyanmar_External_and_Internal_Factors)

### 3.2 Pengeluaran Pemerintahan Myanmar Tahun 2009-2013



[https://www.researchgate.net/publication/320978372\\_Overview\\_of\\_the\\_Myanmar\\_Budget](https://www.researchgate.net/publication/320978372_Overview_of_the_Myanmar_Budget)

kekuatan SDPC bisa dilihat dari banyaknya tokoh penting didalam militer yang memiliki lebih dari satu jabatan di pemerintahan. Seperti Jendral Than Shwe yang memiliki

jabatan sebagai ketua SDPC, panglima besar Tatamadaw, kepala negara, perdana menteri, dan menteri pertahanan. Dengan seorang tokoh yang memiliki lebih dari satu jabatan memungkinkan pembuatan keputusan hanya demi menguntungkan golongannya dan jauh dari arah demokrasi. Karena kepentingan jabatan yang satu bisa mempengaruhi kepentingan yang lainnya sehingga peran yang dijalankan kurang maksimal.

Kekuatan junta militer di dalam atau diluar rezim masih sulit untuk digoyahkan. Dengan jumlah personel militer yang meningkat setiap tahunnya menjadikan kekuatan junta militer semakin kuat. Dan dengan tokoh di dalam rezim militer yang memiliki peran penting menyebabkan pemerintahan bisa bertahan lama karena keputusan yang dibuat demi kepentingan hegemoni mereka. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah junta militer yang sangat ketat dalam mengontrol masyarakat membuat kekuatan militer semakin kuat.

Hal ini dapat diamati dari contoh *National Convention* 9 Januari 1993 yang menjelaskan tentang kontrol militer terhadap dewan eksekutif dan legislatif yaitu dengan menduduki 25% pejabat *Tatmadaw* dalam parlemen, 110 dari 440 kursi di Majelis Rendah (Pyithu Hluttaw) dan 56 dari 224 kursi di Majelis Tinggi. Jika kursi-kursi penting dikuasai terus oleh militer otomatis kekuatan militer tetap terjaga. Hanya saja entah semakin menguat atau melemah tergantung pada parameter apa yang harus digunakan.

## **D. POLITIK DAN PEMERINTAHAN MYANMAR**

### **1. Jendral Ne Win (1962-1988)**

Jendral Ne Win sejak meng kudeta kekuasaan dari pemerintah sipil, sudah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya adalah, mengontrol ekonomi negara dan masyarakat dengan sangat ketat, menghapus media, dan menghancurkan kekuatan masyarakat yang dianggap oleh

pemerintah sebagai ancaman bagi pemerintah. Awal tahun 1970 dalam memperkuat kekuasaannya Jendral Ne Win mengubah negara Myanmar menjadi negara sosialis yang menerapkan kebijakan isolatif dan mendirikan partai BSPP. Dan pada tahun 1974, pemerintah Ne Win melaksanakan referendum dan hasil dari referendum tersebut menghasilkan konstitusi Myanmar.<sup>10</sup>

BSPP dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan negara Myanmar yang sosialis dengan cara memperkuat kekuatan militernya, mengatur ekonomi dan sosial masyarakat Myanmar, dan menerapkan kebijakan yang sangat ketat untuk etnis minoritas, Jendral Ne Win juga mengeluarkan kebijakan menghapus semua partai oposisi di Myanmar dan hanya mengakui satu partai yakni partai BSPP sebagai partai yang sangat berpengaruh dalam melanggengkan kekuasaan militer di pemerintahan.<sup>11</sup> Di bidang ekonomi, Ne Win menerapkan kebijakan dengan menghapus sistem kepemilikan pribadi melalui program nasionalisasi.

BSPP yang dijadikan Ne Win sebagai jalan untuk memuluskan jalan politiknya, tidak bisa membuat Myanmar menjadi negara yang stabil dan bebas dari masalah sosial, politik dan ekonomi yang menjadi masalah di Myanmar sudah sejak lama. Dengan adanya konstitusi baru di Myanmar yakni konstitusi 1974 dimana salah satu isi dari konstitusi tersebut adalah kemungkinan diselenggarakannya pemilu yang adil, akan tetapi BSPP selalu menunda pelaksanaannya dan terus memegang kekuasaan pemerintah. Kondisi negara yang masih tidak stabil membuat masyarakat yang kecewa dengan pemerintah melakukan aksi demonstrasi, yang mana aksi demonstrasi ini dilakukan oleh semua golongan masyarakat Myanmar. Aksi demonstrasi tersebut menewaskan 3.000 jiwa, peristiwa itu menjadi bukti dari kepemimpinan yang diktator.

---

<sup>10</sup> Win Min, "Looking Inside the Burmese Military", *Asian Survey*, Vol. XLVII No. 6 November/ Desember 2008, Hal 1022

<sup>11</sup> Humprey Wangke, "ASEAN dan Masalah Kepemimpinan Myanmar", *Jurnal Kajian* Vol. 10 No. 1, Juni 2005, Hal 60-61

Setelah aksi protes yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat, membuat Jendral Ne Win mengundurkan diri dari pemerintahan tanpa alasan yang jelas. Jendral Ne Win meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan kondisi negara yang sedang dalam keadaan kacau. Pengunduran diri Jendral Ne Win bukan akhir dari rezim pemerintah junta militer di Myanmar. Dimana kenyataannya Jendral Ne Win masih menjadi tokoh dibelakang layar pemerintahan dengan masih menjadi ketua BSPP dengan menjadi peyalur calon- calon Jendral yang haus akan kekuasaan. Jendral Ne Win tetap menjadi orang yang berpengaruh di pemerintahan Myanmar walau berada dibalik layar layar demi mempertahankan rezim militer.

## **2. Jendral Saw Maung (1988-1992)**

Jendral Ne Win yang mengundurkan diri digantikan oleh Jendral Sein Lwin yang dikenal sebagai tokoh utama dibalik pembantaian dari tragedi uprising 8888. Sein Lwin juga mengundurkan diri pada tanggal 13 agustus 1988 dan langsung digantikan dengan mantan Jendral yaitu Saw Maung.

Saw Maung kemudian dalam pemerintahannya merencanakan diselenggarakan pemilihan umum multi partai, yang mana pemilu tersebut tetap dalam pengawasan pemerintah. Rencana dari Saw Maung banyak ditentang oleh kelompok oposisi yang menginginkan Saw Maung untuk mundur.<sup>12</sup>

Saw Maung mulai menjalankan pemerintahannya pada tanggal 18 september 1988. Saw Maung membubarkan BSPP yang dimasa pemerintahan sebelumnya menjadi kekuatan pemerintah dalam mempertahankan kekuasaannya dan mendirikan SLORC (*State Law and Order Restoration Council*). Saw Maung pada awal- awal masa pemerintahannya menyatakan konstitusi 1974 sudah tidak berlaku lagi. Dan

---

<sup>12</sup> Nurani Chandrawati, "Perluasan ASEM dan Masalah Myanmar : Melanjutkan Strategi Kompromistis atau Membentuk Kriteria Baru", *Jurnal kajian Wilayah Eropa*, Vol. II No. 3, 2006, Hal 84-85

SLORC menetapkan tiga prinsip nasional yang harus ditaati oleh masyarakat, yakni *Non Disintegration of the national Unity, Non Disintegration of the Union, dan Consolidation of National Sovereignty*.<sup>13</sup>

SLORC pada tahun 1990 secara resmi mengganti nama negara yang sebelumnya bernama Burma menjadi Myanmar dengan Rangoon sebagai ibukota negara, sesuai dengan kebijakan Saw Maung dan disetujui oleh SLORC akhirnya pada tahun 1990 diadakannya pemilu multi partai untuk memilih anggota di parlemen Myanmar.<sup>14</sup> SLORC dan Saw Maung sangat yakin kalau militer akan memenangkan pemilu tersebut karena sifat dari pemerintah yang sangat totaliter dalam mengatur dan mengontrol perolehan suara. Kenyataannya SLORC kalah pada pemilu tersebut, partai oposisi *National League of Democracy* yang merupakan partai bentukan Aung San Suu kyi memenangkan pemilu tersebut. SLORC yang kalah dari pemilu akhirnya membuat keputusan dengan tidak mengakui hasil pemilu tersebut. 29 juli 1990 SLORC tidak lagi menggunakan konstitusi lagi dan menggantinya dengan UU darurat.

Saw maung menerapkan kebijakan ekonomi terbuka berkaca dari kegagalan pemerintahan sebelumnya. Tahun 1988- 1990 pemerintah junta militer mengeluarkan undang-undang tentang investasi asing, peraturan dari sektor keuangan dan perbankan, dan juga program swasta. Bahkan pemerintahan Saw Maung mendapatkan keuntungan dari perubahan dibidang ekonomi ini dari investor asing yang berasal dari Cina, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Malaysia. Reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Saw Maung yang membaik dari sebelumnya belum bisa

---

<sup>13</sup> “*The New ASEAN’s : Vietnam, Burma, Cambodia & Laos*”, Department of Foreign Affairs and Trade Commonwealth of Australia, 1997, Hal 99

<sup>14</sup> Neil A. Englehart, “Is Regime Change Enough for Burma, The Problem of State Capacity”, *Asian Survey*, Vol XLV, No. 4, July/ August 2005, Hal 634

dikatakan berhasil karena hanya menguntungkan sekelompok orang saja di dalam lingkup militer.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pemilu multi partai yang dilakukan juga tidak bisa dikatakan berjalan secara demokratis, karena kemenangan partai NLD dalam pemilu tersebut tidak diakui oleh pemerintah. Masyarakat yang terus- menerus menekan pemerintah untuk menjalankan proses demokrasi yang nyata, membuat Saw Maung memutuskan untuk mengundurkan diri.

### **3. Jenderal Than Shwe (1992-2003)**

Than Shwe yang menggantikan posisi dari Saw Maung pada tanggal 21 april 1992. Pergantian posisi kepemimpinan tidak menjamin Myanmar bisa menerapkan sistem demokrasi yang sudah sangat diharapkan oleh masyarakat Myanmar. Than Shwe dalam menjalankan pemerintahannya didampingi dengan Jendral Khin Nyunt. Tanggal 26 september 1992 Than Shwe mencabut undang- undang darurat yang diberlakukan selama pemerintahan Saw Maung. Than Shwe juga berjanji tidak akan melakukan tindakan penekanan kepada kaum minoritas.<sup>16</sup>

Pemerintahan Jendral Than Shwe yang represif dan otoriter yang sangat tidak beda jauh dari pemerintahan sebelumnya, yang mana dalam masa pemerintahannya Than Shwe mengambil beberapa kebijakan yang kemudian hari banyak menimbulkan masalah buat masyarakat. Sebagai contohnya yakni, menangkap, memenjarakan, dan menyiksa para pendukung atau masyarakat yang ingin merubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi. Selain itu, adanya larangan untuk masyarakat berkumpul lebih dari lima orang di malam hari, dan kebijakan yang lebih parah adalah menaikkan harga

---

<sup>15</sup> Priyambudi Sulistiyanto, "Politik Reformasi ekonomi dan Demokrasi; Studi Perbandingan Thailand, Indonesia, dan Burma", *Prisma LP3ES*, No 5 tahun XXVI, Mei-Juni 1997, Hal 21-22

<sup>16</sup> Nurani Chandrawati, "Perluasan ASEM dan Masalah Myanmar : Melanjutkan Strategi Kompromistis atau Membentuk Kriteria Baru", *Jurnal kajian Wilayah Eropa*, Vol. II No. 3, 2006, Hal 88



bahan bakar minyak sebesar 500%. Menutup semua akses informasi informasi dari dunia luar yang ingin masuk ke Myanmar, diputusnya jaringan telepon dan internet, dan melarang bagi masyarakat Myanmar untuk berpergian lebih dari lima mil utama yang ada diseluruh daerah yang ada di Myanmar.

Watak Jendral Than Shwe yang masih memiliki sikap atau cara pandang yang kuno, akhirnya memberhentikan wakilnya yakni Jendral Khin Nyunt, yang lebih sikap atau cara pandang yang lebih modern dibandingkan Jendral Than Shwe. Jendral Khin Nyunt memiliki pandangan yang sangat bagus untuk kemajuan negara, salah satunya adalah perlu diadakannya reformasi di Myanmar serta adanya keterlibatan dunia internasional dalam proses demokrasi di Myanmar. Jendral Khin Nyunt yang memiliki tekad untuk menciptakan reformasi di Myanmar akhirnya meluncurkan program “*Road Map to Democracy*” pada tanggal 30 agustus 2003.<sup>17</sup>

SLORC berubah nama menjadi SPDC (*State Peace and Development Council*) pada tanggal 15 november 1997 dibawah pemerintahan Jendral Than Shwe. Perubahan SLORC menjadi SPDC tidak membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, SPDC masih tetap menggunakan karakter yang menekan, otoriter, dan totaliter.

Perubahan SLORC ke SPDC lebih ditunjukkan untuk menata kebijakan politik dan ekonomi Myanmar agar bisa dengan cepat mengejar semua ketertinggalan dari negara-negara lain terutama negara di kawasan Asia Tenggara. Apalagi Myanmar pada masa pemerintahan Jendral Than Shwe sudah menjadi anggota tetap di organisasi ASEAN. SPDC yang ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat membuat pencitraan dengan membebaskan para tahanan politik yang dianggap tidak membahayakan keamanan negara, selain itu Jendral Than Shwe berjanji kepada masyarakat tidak akan memegang kekuasaan di pemerintahan dengan waktu yang lama, serta berjanji akan memberikan kekuasaan kepada

---

<sup>17</sup> Humprey wangke, “ASEAN dan Masalah Kepemimpinan Myanmar”, *Jurnal Kajian*, Vol 10 No 1, Juni 2005, hal 57

sipil setelah konstitusi baru terbentuk.<sup>18</sup> Apa yang dijanjikan oleh Jendral Than Shwe hanya merupakan janji- janji palsu kepada masyarakat karena sampai sekarang peralihan kekuasaan pemerintahan dari militer ke sipil tidak kunjung terlaksana. Janji palsu dari Than Shwe yang lainnya adalah pembebasan para tahanan yang hanya bersikap sementara, karena setelah mereka bebas dan kembali melakukan tindakan-tindak yang menyuarakan pemerintahan demokrasi mereka kembali menjadi tahanan politik.

Fakta lain mengenai kediktatoran Jendral Than Shwe selama memimpin terlihat dari sikapnya dalam menanggapi tekanan- tekanan dari dunia internasional yang mengkritik kebijakan dan gaya kepemimpinan Than Shwe, dengan memberikan tanggapan apa arti demokrasi menurut persepsi dari pemerintah Myanmar. Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Than Shwe semakin menegaskan arah demokrasi di Myanmar masih sangat jauh karena dominasi dan kekuatan dari junta militer yang masih sulit untuk digantikan.<sup>19</sup>

Selama tiga generasi kepemimpinan junta militer di Myanmar belum menunjukan perubahan yang signifikan. Janji junta militer untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis dan mengembalikan pemerintahan ke masyarakat sipil tidak kunjung terlaksana. Dalam bidang ekonomi pemerintah junta militer hanya memusatkan pada bisnis yang menguntungkan untuk anggota junta militer. Sehingga kekuatan dari junta militer dalam mengendalikan kehidupan politik, sosial dan ekonomi masyarakat masih sangat kuat.

---

<sup>18</sup> “*Sang Merah Putih di Tanah Pagoda, kenangan, Masa Kini dan Harapan*”, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Yangon, Edisi ke-2 2002, hal 73

<sup>19</sup> Nurani Chandrawati, “Perluasan ASEM dan Masalah Myanmar : Melanjutkan Strategi Kompromistis atau Membentuk Kriteria Baru”, *Jurnal kajian Wilayah Eropa*, Vol. II No. 3, 2006, Hal 88

#### 4. U Thein Sein (2011-2013)

Tanggal 4 Februari 2011, Thein Sein terpilih menjadi presiden dari sipil pertama sejak pemerintah junta militer berkuasa selama 50 tahun, terpilihnya Thein Sein karena kemenangan partai USDP pada pemilu pada tahun 2010. Thein Sein tidak sendirian dalam menjalankan pemerintahannya, Thein Sein ditemani oleh wakilnya Tin Aung Myint Oo Dan Sai Mauk Kham.

Dimasa pemerintahan Thein Sein beberapa kebijakan besar dikeluarkan dan semuanya itu mengarah ke perubahan besar menuju pemerintahan yang demokrasi salah satunya, membebaskan lagi para tahanan politik yang pada masa pemerintahan sebelumnya ditangkap, tokoh besar Aung San Suu Kyi dan teman- temannya menjadi salah satu yang dibebaskan oleh Thein Sein. Thein Sein juga mengeluarkan kebijakan untuk menghapus kebijakan isolasi yang telah diterapkan oleh pemerintah semenjak kudeta yang dilakukan Jendral Ne Win, dan membuat Myanmar lebih membuka diri ke dunia internasional. Maret 2012 kembali diadakannya pemilu, NLD memenagkan pemilu tersebut dengan mendapatkan 30 dari 45 kursi yang diperebutkan. Thein Sein menjadi harapan baru dari masyarakat agar bisa membuat kemajuan dan membuat Myanmar menjadi negara yang menganut sistem demokrasi seperti yang sudah diharapkan selama ini.<sup>20</sup>

Kematian perdana menteri Soe win tahun 2007, membuat Thein Sein secara resmi menggantikan posisi Soe Win sebagai perdana menteri sejak oktober 2007 sampai februari 2011.

29 april 2010 Thein Sein memutuskan untuk pensiun dari dunia militer dan lebih fokus untuk memimpin partainya USDP yang dipersiapkan untuk maju pada pemilu 2010 bersama dengan 22 pejabat militer yang lainnya. Sejak menjabat sebagai presiden Myanmar Thein Sein melakukan

---

<sup>20</sup> Khanisa Krisman : *Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar*. Diakses dari: <http://www.politik.lipi.go.id/en/columns/politik-internasional/624-garis-awal-jalan-demokrasi-myanmar.html>.

kebijakan- kebijakan besar yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, berikut adalah kebijakan yang dikeluarkan:

## **1. Perubahan di Bidang Politik**

### **a. Mengganti Anggota Kabinet Lama**

Thein Sein melakukan kebijakan untuk mengganti kabinet yang lama, bertujuan untuk menyingkirkan para anggota-anggota kabinet yang memiliki pemikiran anti reformasi. Thein Sein beranggapan anggota yang seperti ini membahayakan karena dapat mengganggu reformasi politik dan ekonomi yang ingin Thein Sein terapkan di masa pemerintahannya. Perombakan kabinet pada pemerintahan Thein Sein merupakan yang terbesar dan meruntuhkan hegemoni militer di dalam pemerintahan Myanmar.

Thein Sein mengganti 9 posisi dari 29 posisi yang ada di dalam kabinetnya. Yang dimana perombakan ini menghasilkan 15 orang diangkat menjadi deputy menteri baru. Pemerintahan Thein Sein juga melakukan reshuffle kepada 20 menteri dan ada 2 menteri yang mengundurkan diri, serta menunjuk 20 menteri baru untuk masuk ke dalam kabinetnya. Dalam pemerintahan Thein Sein akhirnya emansipasi terhadap perempuan diterapkan dengan diangkatnya menteri dari kaum perempuan. Kabinet baru pemerintahan Thein Sein ini sebagian besar berasal dari masyarakat sipil dan tektorat, dan semakin menjauhkan pemerintahan Thein Sein dari anggota militer. Walau begitu Thein Sein masih tetap menunjuk anggota militer untuk mengisi di 3 posisi di dalam kabinetnya, tetapi anggota militer yang direkrut oleh Thein Sein untuk masuk kedalam kabinetnya ini jauh dari pengaruh junta militer.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> 2012. "New Super Cabinet Drives RapidChange." Ft.Com. The Financial Times Limited:London.

## **b. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Thein Sein membentuk Myanmar *National Human Rights commission* (MNHCR) pada tanggal 5 september 2011 yang berpusat di rangoon.<sup>22</sup> MNHCR memiliki tujuan untuk memperkenalkan dan melindungi hak- hak dasar warga negara yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintahan sebelumnya. MNHCR memiliki anggota yang beragam, 15 anggota tersebut berasal dari berbagai kalangan tidak menutup hanya pada satu golongan saja, ada yang berasal dari militer, sipil, dan mahasiswa, duta besar, professor dan pejabat di pemerintahan. Kembali emansipasi wanita diterapkan di MNHCR yakni dengan adanya anggota di dalam MNHCR.

## **c. Menghapus Sensor Untuk Media**

Salah satu kebijakan dalam reformasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Thein Sein adalah adanya kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat yang sudah diatur dalam Media Law. Thein Sein sudah sedikit melonggarkan peraturan terhadap sensor media pada masa awal pemerintahannya. Salah satu yang sudah dilakukan dalam menghapus sensor media untuk naskah- naskah politik serta agama tidak ada lagi sensor untuk dimasukkan kedalam pemberitaan di Myanmar. Yang dimana dalam pemerintahan sebelumnya yakni junta militer semua pemberitaan mengalami sensor dalam segala hal termasuk olahraga, hiburan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Penghapusan sensor untuk media ini meringankan biaya untuk penerbitan. Penghapusan sensor media juga meringankan sanksi- sanksi yang diberikan dari dunia internasional yang mana menghimbau untuk adanya

---

<sup>22</sup> 2012. "The Rule Of Myanmar: Challenges and Prospects". Report of the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI).International Bar Associatin: London. Dikutip dari:<http://burmanationalnews.net/burma/images/Documents/ibahriruleoflwinmyanmarchallengesandprospects201212.pdf>

kebebasan. Sejak 1962 sampai 2010 ketika pemerintahan junta militer mengendalikan kekuasaan kebebasan pers sama tidak ada sama sekali sehingga tidak ada masyarakat yang berani menyuarakan pendapat dan aspirasinya. Pada masa pemerintahan junta militer 140 penerbitan termasuk 60 terbitan mingguan harus selalu menyerahkan teks kepada lembaga sensor untuk dicermati dan dipelajari apakah layak untuk diterbitkan kepada masyarakat.<sup>23</sup> tahun 2013 melalui *Reporters Without Borders* melaporkan rangking dalam kebebasan pers di dunia, dan Myanmar berada diperingkat 151 dari 179 negara yang naik 18 peringkat dari tahun sebelumnya. Membandingkan dalam hal kebebasan pers dari pemerintahan junta militer dan juga Thein Sein sungguh sangat berbeda jauh.<sup>24</sup>

#### **d. Kebebasan berpendapat dan berserikat bagi buruh**

Kebijakan reformasi yang dikeluarkan oleh Thein Sein salah satunya adalah mengeluarkan undang- undang mengenai hak pekerja dan buruh maret 2012. Dikeluarkannya undang- undang tersebut sebagai bukti adanya pengakuan hak dari pemerintah kepada para kaum buruh dan pekerja dan sebagai salah satu cara untuk terciptanya demokrasi di Myanmar.

Isi Dari undang- undang ini salah satunya adalah kebebasan bagi para buruh dan pekerja untuk mendirikan serikat pekerja dan juga melakukan aksi kerja, serta melakukakan demonstrasi untuk mengemukakan pendapat para kaum buruh dan pekerja ini. Undang- undang ini juga memperkenalkan adanya perlindungan hukum bagi kaum buruh dan pekerja yang dipecat oleh majikannya karena aksi mogok dalam bekerja.

---

<sup>23</sup> 2012. *Myanmar Longgarkan Sensor*. DW Akademie. Dikutip dari: <http://www.dw.de/myanmar-longgarkan-sensor/a-16178940-1>.

<sup>24</sup> *Press Freedom Index*. Reporters Without Borders. Dikutip dari: [http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id\\_rubrique=1034](http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034).

Undang-undang kebebasan buruh ini diatur dalam undang-undang Myanmar yaitu *The Settlement of Labour Dispute Law* (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 5/2012).

#### **e. Membebaskan para tahanan politik**

Sejak Thein Sein menjabat sebagai presiden Myanmar, sudah banyak perubahan yang sudah dilakukan salah satunya yakni adanya jaminan dari pemerintah untuk hak hidup dan hak dasar rakyat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Thein Sein juga memberikan amnesti kepada para tahanan dan membebaskan para tahanan. Dibebaskannya para tahanan menurut Thein Sein lebih kepada menghormati hak-hak politik dan memberikan peluang bagi mereka para tahanan yang telah dibebaskan untuk membantu dalam pembangunan bangsa.

Tahun 2011 presiden Thein Sein telah membebaskan sekitar 800 tahanan politik. Kemudian, pada November 2012 presiden Thein Sein kembali membebaskan tahanan politik sebanyak 452 orang, hal ini juga dikarenakan sebagai penyambutan dari rencana kunjungan presiden Amerika Serikat Barack Obama. Untuk mendukung dan membantu tahanan politik terdapat sebuah organisasi internasional yang dikelola oleh mantan tahanan politik. Organisasi internasional ini bernama *The Assistance Association for Political Prisoners* (AAPP). Organisasi ini khusus bekerja di Myanmar.

Tujuan utama AAPP adalah untuk secara aktif berkampanye untuk membebaskan seluruh tahanan politik di Myanmar. AAPP juga memberikan bantuan kepada para mantan tahanan yaitu dengan tiga program yang besar yaitu, yang pertama *Assistance Program for Political Prisoners*, kedua *Mental Health Assistance Program*, dan yang ketiga yaitu *Educational and Vocational Support*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> 2013. *Annual Report 2013*. Assistense Associations for Political Prisoners. Dikutipdari: [http://www.aappb.org/Annual\\_Report\\_2013\(Eng\).pdf](http://www.aappb.org/Annual_Report_2013(Eng).pdf).

## 2. Perubahan di Bidang Ekonomi

### a. Liberalisasi ekonomi

Perubahan yang dilakukan Thein Sein dalam bidang ekonommi yakni dengan tujuan untuk lebih menstabilkan keadaan ekonomi Myanmar dan memberantas kemiskinan yang terjadi di Myanmar. Diawal masa jabatannya Thein Sein sudah membuat beberapa rencana untuk ekonomi Myanmar yaitu meningkatkan pendapatan perkapita *Gross Domestic Product* (GDP) yang bertujuan memberantas kemiskinan di Myanmar dengan lebih memprioritaskan perkembangan di bidang industrialisasi, karena industrialisasi dijadikan sebagai prioritas utama dalam memberantas kemiskinan sehingga diperlukan juga *Foreign Direct Investment* (FDI) yang menarik, diperlukan untuk membangun infrastruktur yang tepat dan menghapus kendala- kendala yang ada di Myanmar agar FDI tersebut menarik. Pemerintah Thein Sein sudah memberikan target dalam membangun rencana ekonomi Myanmar 5 tahun kedepan, yakni meningkatkan pertumbuhan GDP sebesar 7,7% dan juga menargetkan peningkatan di jatah di pasar manufaktur 26% menjadi 32,1% di GDP, kebijakan lainnya adalah menurunkan jatah pertanian yang mana sebelumnya sebesar 36,4% menjadi 29,2% pada akhir tahun 2015.<sup>26</sup>

Pemerintah juga melakukan liberalisasi di berbagai bidang lainnya yakni di bidang telekomunikasi, energi, industri, dan lain- lain. Di bidang energi kebijakan pemerintah Thein Sein adalah melakukan ekspor gas alam ke beberapa negara dan ekspor gas alam, menjadi pemasukan terbesar buat pemerintah dibandingkan dengan pemasukan di bidang pertanian dan

---

<sup>26</sup> Ikuko Okamoto. 2013. *Comment on "Toward Myanmar's New Stage of Development: Transition from Military Rule to the Market"*. *Asian Economic Policy Review*. Vol 8. Issue 1. Hal: 120– 121. Dikutip dari: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aepr.12011/full>.



manufaktur. 15 Januari 2013 Pemerintah Thein Sein mengundang para investor asing untuk mendaftarkan ketertarikan mereka kepada penawaran untuk mendapatkan dua dari empat lisensi telekomunikasi nasional. Peningkatan situasi di Myanmar setelah perubahan pemerintah Thein Sein dalam bidang telekomunikasi menjadikan Myanmar negara yang paling dicari untuk membuka pasar telekomunikasi baru di Asia.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Myanmar, dengan menjadikan bank yang ada diseluruh daerah Myanmar sebagai prioritas utama untuk menciptakan kestabilan nilai tukar mata uang Myanmar yakni Kyat terhadap mata uang Dollar. Thein Sein berpikir bahwa nilai tukar mata uang yang stabil akan semakin menambahkan kepercayaan kepada masyarakat dan para pebisnis untuk menilai keadaan ekonomi Myanmar yang sudah semakin membaik sejak adanya perubahan di bidang ekonomi. Pemerintah juga membuat kebijakan menurunkan biaya ekspor untuk para investor asing. Pemerintah juga membuat kebijakan ekonomi untuk jangka waktu yang lama dimana pembangunan infrastruktur yang seimbang dipastikan adanya pertumbuhan ekonomi yang mencukupi dan juga mendukung banyak terciptanya lapangan pekerjaan serta mengurangi ketergantungan eksploitasi sumber daya alam.

Investasi besar yang menjadi perhatian bagi para investor asing yaitu dalam sektor energi, gas alam, tenaga air, pertambangan. Yang mana tahun 2012 memberikan kenaikan nilai FDI sebesar US\$ 133 juta. Berbeda dengan di sektor manufaktur yang masih menjadi sektor yang baru di Myanmar hanya mengalami sedikit kenaikan saja. Uni Eropa mendorong Myanmar untuk melakukan ekspor manufaktur, dorongan ekspor manufaktur diberikan Uni Eropa ketika memutuskan untuk membawa Myanmar kembali ke *Generalized System of Preference* (GSP).

GSP bertujuan untuk memberikan tarif harga yang spesial untuk barang- barang yang akan di ekspor ke Uni Eropa dari negara berkembang seperti Myanmar. Selain itu dengan

semakin kuatnya mata uang Myanmar mendorong para perusahaan- perusahaan motor melakukan untuk impor kendaraan bermotor serta suku cadang kendaraan ke Myanmar. Untuk pertama kalinya sejak beberapa dekade, menghapus monopoli impor mobil yang mana sebelumnya selalu dipegang oleh dua perusahaan besar di Myanmar.<sup>27</sup>

### **b. Adanya Jaminan Hukum bagi Para Investor Asing**

Setelah Thein Sein menjabat sebagai presiden Myanmar sudah banyak sistem hukum yang diperbaiki di Myanmar salah satunya sistem hukum yang dirubah adalah hukum tentang investor asing. Hukum ini telah disahkan oleh parlemen pada bulan september tahun 2012. Hukum tentang para investor asing ini sudah diatur didalam *The Foreign Investment Law* (The Pyidaungsu Hluttaw Law No 21/2012) yang telah disahkan juga oleh presiden Thein Sein, yang menggantikan dari hukum yang sebelumnya bernama *Myanmar Foreign Investment Law* (MFIL) tahun 1988.

Hukum investor asing yang baru saja disahkan oleh parlemen dan Thein Sein ini sangat berbeda dengan adanya perubahan salah satunya adalah jumlah investasi yang harus dikeluarkan oleh para investor asing yang ingin membuka investasi di Myanmar. Hukum yang baru menghilangkan persyaratan untuk menyerahkan modal minimal US\$ 5 juta bagi para investor asing saat ingin memulai usaha dengan para mitra lokal di Myanmar. Perubahan yang lainnya cukup terasa adalah tentang batasan kepemilikan saham buat para investor yang sebelumnya hanya bisa mencapai 49% tetapi sejak adanya hukum baru bisa mencapai 50%.

---

<sup>27</sup> Robert H Taylor. 2013. *Southeast Asian Studies: Myanmar In 2012, mhyaw ta lin lin or Great Expectations*. Institute of Southeast Asian Studies: Singapore. Hal: 191-203. Dikutip dari: <http://e-resources.pnri.go.id:2056/docview/150852611>

*International Monetary fund* (IMF) memuji kinerja pemerintahan Myanmar dibawah kepemimpinan Thein Sein yang sudah berhasil membuat peraturan tentang pajak, dan selain itu IMF memuji kinerja Thein Sein yang sudah membuat dan mensahkan undang- undang untuk para investor asing. IMF juga memuji Myanmar dengan mengatakan pemerintahan yang sekarang memiliki kesempatan untuk membuat sejarah bagi negara Myanmar untuk menjadi negara di kawasan Asia dengan kekuatan ekonomi yang besar.

Tahun 2013 hukum untuk para investor asing diperbaharui oleh pemerintah Myanmar, perubahan ini mengatur tentang ketentuan dalam penggunaan lahan, struktur hukum, dan penambahan penghasilan buat perusahaan asing. Para negara yang sebelumnya memberikan sanksi ekonomi kepada Myanmar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa akhirnya memberikan keringanan sanksi kepada Myanmar karena adanya perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintah Myanmar. Dengan diringkankan sanksi adalah hal yang paling ditunggu- tunggu oleh para investor asing yang sudah membuka investasi di Myanmar.<sup>28</sup>

Setelah 50 tahun Myanmar menjadi negara yang otoriter setelah pemerintah junta militer mengku deta pemerintahan sipil, dan akhirnya angin segar berpihak kepada masyarakat setelah Thein Sein memegang kendali pemerintahan Myanmar. Setelah dilantik menjadi presiden Thein Sein langsung melakukan perubahan besar buat negara Myanmar dengan melakukan beberapa reformasi dibidang politik dan ekonomi. Perubahan ini karena saat Thein Sein menjabat Myanmar sedang mengalami masalah yang sangat kompleks, Thein Sein juga berpendapat dengan perlunya perubahan bisa

---

<sup>28</sup> Gwen Robinson & Robin Harding. 2012. *Financial Times: Myanmar finalises investment law*. The Financial Times Limited: London. Dikutip dari: <http://e-resources.pnri.go.id:2056/docview/1011635117>.

menjadikan Myanmar negara yang lebih maju dan sejahtera dibandingkan sekarang. Thein Sein juga menyebutkan kenapa Myanmar sulit untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera karena pemerintahan yang otoriter dibawah pemerintahan junta militer, permasalahan hak asasi manusia yang tinggi, ekonomi Myanmar yang lemah dan tidak stabil, serta tidak adanya kebebasan untuk media pers dan kaum buruh untuk berserikat.

Reformasi yang dilakukan Thein Sein bertujuan untuk menjadikan Myanmar negara yang lebih demokratis, negara yang menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia. Selain itu perubahan ini berusaha untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik serta meningkatkan taraf kemakmuran dalam hidup masyarakat. Perubahan yang dilakukan Thein Sein adalah usaha atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang mana hal tersebut sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan akhirnya perubahan yang dilakukan Thein Sein memberikan suasana yang lebih baik di Myanmar.